



Judul : DPR Terus Memproses Hak Angket
Tanggal : Jumat, 24 Februari 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

GUBERNUR DKI JAKARTA

DPR Terus Memproses Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun mayoritas fraksi menilai hak angket status Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak diperlukan, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memproses usulan hak yang masuk. Sementara pengusul baru akan mencabut usulannya jika pemerintah memberhentikan sementara Basuki.

Dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Kamis (23/2), Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, yang memimpin rapat, membacakan surat dari pengusul hak angket tertanggal 13 Februari 2017, yang

diterima pimpinan DPR. "Usulan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku," ujar Fadli.

Dibacakannya surat merupakan tahap awal dari mulai diprosesnya usulan angket. Setelah itu, Fadli melanjutkan, akan ada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menetapkan jadwal paripurna guna pengambilan keputusan atas angket tersebut.

Usulan angket ditandatangani oleh 93 dari total 560 anggota DPR. Mereka anggota DPR empat fraksi dari total 10 fraksi di DPR. Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai

Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Jumlah pengusul ini sudah melebihi syarat pengajuan usulan hak angket yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Meski telah memenuhi syarat, usulan angket tidak mudah untuk disetujui. Tata Tertib DPR menyebutkan, usul menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

"Memang selisihnya cukup ja-

uh, ditambah lagi mayoritas fraksi kontra angket sudah menyatakan sikapnya akan solid menolak," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.

Dalam Rapat Paripurna DPR kemarin, meskipun agendanya hanya membacakan usulan angket, kubu fraksi yang pro dan kontra usulan angket sudah terlihat mencoba saling memengaruhi. Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, misalnya, mengimbau pengusul hak angket untuk mencabut usulannya karena bisa membuat gaduh situasi. (APA)